

# **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA KUANOM KECAMATAN PIRINE KABUPATEN LANNI JAYA**

Oleh:  
**KOTANIUS YIKWA**  
**NIM 090816009**

## **ABSTRAK**

*Partisipasi Masyarakat sebagai bagian yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan Pembangunan Desa. Berhasilnya pelaksanaan pembangunan Desa akan sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat melalui bentuk-bentuk partisipasi antara lain melalui Partisipasi Tenaga, Harta Benda/ Materi, Sumbangan melalui bentuk Uang, Partisipasi melalui Gagasan-gagasan, Ide-ide maupun buah Pikiran.*

*Key words : Masyarakat, Partisipasi Masyarakat*

## **PENDAHULUAN**

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang mutlak harus ada, demi tercapainya proses pembangunan desa. Oleh karena itu usaha-usaha untuk membangkitkan partisipasi perlu dikembangkan, sehingga tanggung jawab pembangunan desa akan dapat di rasakan oleh masyarakat, karena masyarakat benar-benar terlibat dan turut berperan serta di dalamnya

Hal ini sesuai dengan apa yang telah ditegaskan didalam kebijaksanaan dalam pembangunan desa itu mengutamakan keseimbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah disatu pihak untuk memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan

fasilitas serta masyarakat memberikan partisipasi dalam pembangunan yang berbentuk prakarsa dan swadaya gotong-royong pada setiap program pembangunan yang diinginkan.

Dari kondisi obyektif di Papua secara umum dan secara khusus di desa Kuanom Kecamatan Pirine kabupaten Lannijaya bahwa partisipasi masyarakat Desa belum dapat dibangkitkan secara nyata sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan Desa. Hal ini dapat dilihat dari bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat secara umum adalah partisipasi dalam bentuk tenaga.

Adapun perumusan masalah yang akan diuraikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:  
1). Sejauhmana Realisasi partisipasi

dalam pelaksanaan pembangunan Desa, 2). Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Kuanom Kecamatan Pirine dan 3). Hambatan apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa di Desa Kuanom Kecamatan Pirine

## **PEMBAHASAN**

a. Realisasi dari Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Bahwa partisipasi dapat dilihat dari adanya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan. Tingkat kesadaran ini akan tumbuh secara nyata manakala masyarakat ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Bahwa realisasi dari partisipasi dalam pembangunan desa dapat diaplikasikan melalui bentuk kerjabakti, membersihkan, membuat/selokan air, membersihkan lokasi untuk pembangunan jalan setapak, dan pembuatan serta perampungan gedung ibadah .

Suatu masalah yang dijadikan cakupan dasar dalam perencanaan partisipatif. Agar pelaksanaan pembangunan dapat berhasil dengan baik maka perlu didukung

dengan informasi yang jelas kepada mereka. Apabila masyarakat belum mampu merumuskan sendiri masalah dan kebutuhannya, maka perangkat desa membantu merumuskan masalah dan kebutuhan masyarakat tersebut". Namun partisipasi seperti ini masih belum tumbuh secara nyata dikalangan masyarakat desa karena berkaitan dengan keterbatasan latar belakang pendidikan.

Dalam partisipasi akan tumbuh secara nyata kalau masyarakatnya memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Karena dengan pendidikan yang tinggi maka masyarakat akan memiliki kesadaran, kemauan, serta prakarsa masyarakat dan perlu didukung dengan tingkat pendidikan yang memadai. Jadi realisasi dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa akan tumbuh secara nyata apabila dilatar belakangi dengan tingkat pendidikan oleh karena itu makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka akan semakin nyata realisasi dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Partisipasi adalah dengan kesukarelaan, tanpa digerakan oleh orang lain sehingga muncul dari adanya kesadaran dan kemauan sendiri dari seluruh anggota masyarakat.

Bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat diaplikasikan dari ikut sertanya perangkat desa dalam

kegiatan-kegiatan pembangunan desa seperti dengan tingkat kedisiplinan, tanggungjawab dalam memikul beban pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa berkaitan dengan pengerahan massa, untuk membantu kegiatan pembangunan desa seperti pembangunan fisik dalam berbagai kegiatan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat diaplikasikan dalam bentuk keikutsertaan, kesukarelaan maupun tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa adalah bukti nyata masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa berupa kegiatan fisik seperti membuat jalan setapak, membangun rumah ibadah, membuat selokan air, realisasi dari partisipasi seperti ini perlu diprakarsai oleh pemerintah desa. .

Dalam pelaksanaan pembangunan desa khususnya didesa Kuanom bahwa pembangunan fisik kini diarahkan dari dana Bantuan Pembangunan Desa yakni melalui dana APBD Desa dan didesa Kuanom realisasi pelaksanaan pembangunan yang bersifat fisik dengan dana bantuan secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 104.500.000 yakni dari dana Bantuan Pembangunan Desa sebesar Rp. 87.000.000 sedangkan dana dari swadaya masyarakat

adalah sebesar Rp. 17.500.000.- Dari segi jumlah dana yang diserap dalam pelaksanaan pembangunan fisik memang tidak terlalu besar namun cukup membantu masyarakat desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan lainnya, terutama untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam merealisasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik hal ini dilihat dari besarnya animo masyarakat untuk dapat membantu pemerintah desa. Untuk pelaksanaan pembangunan non fisik yakni diarahkan pada upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar dapat mandiri dalam melaksanakan kegiatan usaha mereka.

#### b. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan sangat berkaitan dengan bentuk partisipasi yang mereka berikan antara lain partisipasi dalam bentuk harta benda, ide-ide/gagasan, partisipasi tenaga, partisipasi dalam bentuk materi. Masyarakat desa memiliki tingkat partisipasi yang berbeda sesuai dengan bentuk partisipasi yang mereka berikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat dirangkum dari jawaban informan sebagai berikut :

Bentuk partisipasi yang lebih Dominan adalah Partisipasi tenaga. Untuk membangkitkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu didukung dengan latar belakang pendidikan.

Bentuk partisipasi paling menonjol adalah partisipasi dimana adanya pengerahan masa untuk membantu kegiatan pembangunan Desa seperti membersihkan selokan air, membuat jalan setapak, pembangunan gedung gereja, dan berbagai jenis partisipasi tenaga lainnya bentuk partisipasi

Bentuk partisipasi tenaga yang dilakukan oleh masyarakat desa dalam kaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa adalah ikut kerja bakti apabila ada kegiatan-kegiatan didesa yang memerlukan tenaga yang banyak, seperti membersihkan, membuat/selokan air, membersihkan lokasi untuk pembangunan jalan setapak, kerja bakti dalam kaitan dengan pembuatan dan perampungan gedung gereja, dan berbagai kegiatan lainnya yang memerlukan aktivitas orang banyak. Bentuk partisipasi seperti ide-ide dan memberikan gagasan belum tumbuh secara nyata karena disebabkan masyarakat belum memahami arti dari bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi dalam bentuk ide-ide, gagasan, buah pikiran akan tumbuh secara nyata manakala masyarakat sudah memiliki latar belakang penge-

tahuan yang luas yang dilihat dari tingkat pendidikan.

Bahwa bentuk partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa secara umum adalah dalam bentuk kerjabakti, namun ada pula yang memberikan partisipasi berupa pemberian sumbangan dalam bentuk materi apabila bagi mereka ada kelebihan.

Bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga adalah partisipasi yang tumbuh secara sukarela, namun untuk menumbuhkan partisipasi seperti ini perlu ada dorongan atau rangsangan yakni dari pihak yang berkepentingan seperti dari pemerintah Desa. Selain bentuk partisipasi seperti tenaga ada juga partisipasi yang diberikan oleh masyarakat berupa materi. Partisipasi dalam bentuk materi ini juga mutlak diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan seperti adanya kesediaan masyarakat untuk memberi diri dalam hal untuk membantu kegiatan pembangunan gedung ibadah masyarakat seringkali memberikan semen, Batu, Pasir, Gula pasir, Kopi, Papan, Kayu Balok, dan berbagai jenis materi lainnya. Partisipasi seperti ini juga tidak didasarkan pada unsur paksaan melainkan muncul dari nati nurani masyarakat.

Pada dasarnya partisipasi dalam bentuk tenaga merupakan partisipasi yang umum dilakukan oleh masyarakat desa terutama ikut sertanya dalam bentuk kerjabakti bentuk partisipasi seperti ini perlu

digerakan melalui pendidikan. Jadi latar belakang pendidikan juga ikut mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan Desa akan berhasil dengan baik apabila didukung dengan latar belakang pendidikan yang memadai.

Bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara umum lazim dilakukan didesa-desa lainnya seperti partisipasi tenaga, berupa kerja bakti dalam membersihkan selokan air, membangun gedung ibadah, membuat jalan setapak, membuat gorong-gorong serta bentuk partisipasi materi berupa pemberian sumbangan untuk kepentingan pembangunan desa. Berkaitan dengan bentuk partisipasi yang lain seperti partisipasi ide-ide, gagasan maupun buah pikiran, bila dilihat dari sebagian besar anggota masyarakat belum tumbuh secara nyata karena masyarakat secara umum memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Partisipasi ini dilihat lebih dominan kalau masyarakatnya memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi seperti terlihat para guru, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, elit desa karena mereka secara umum sudah memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi minimal berlatar belakang pendidikan SLTA.

Bentuk partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih dominan berupa kerja bakti,

membersihkan selokan air, membuat jalan setapak, membangun gedung ibadah. Bentuk partisipasi seperti ini dinamakan partisipasi tenaga sedangkan bentuk partisipasi lain berupa pemberian dalam bentuk materi seperti bahan-bahan bangunan yang disumbangkan kepada gereja, ataupun pembuatan jalan bagi mereka yang berkelebihan. Sedangkan lainnya adalah membantu memberikan bantuan berupa papan kayu, memberikan kue bagi mereka yang kerja bakti dan bentuk partisipasi materi lainnya. Sedangkan bentuk partisipasi yang lebih tinggi berupa ide-ide, buah pikiran maupun gagasan akan tumbuh secara nyata apabila terdapat pada masyarakat yang sudah lebih kritis berupa sumbangan pemikiran baik diforum maupun dalam merencanakan kegiatan pembangunan dusun seperti pengusulan proyek pembangunan, mengatasi permasalahan yang muncul didalam masyarakat.

Hasil penelitian tentang bentuk-bentuk partisipasi dalam pembangunan sebagaimana dikemukakan oleh beberapa informan telah teruji dalam teori sebagaimana dikemukakan oleh Simandjuntak (2006) telah memberikan pemahaman tentang bentuk partisipasi yang memiliki ciri-ciri berbentuk sumbangan, saran, nasihat, pertimbangan, pemikiran, dorongan, berbentuk material berupa uang, barang,

peralatan, maupun bentuk partisipasi tenaga.

Partisipasi yang nyata dilakukan oleh masyarakat teruji dari teori yang dikemukakan oleh Mubyarto (2004) yang mengemukakan bahwa partisipasi merupakan keadaan yang membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan masyarakat tanpa berarti mengorbankan kepentingan pribadi. Bentuk partisipasi seperti ini dapat dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari unsur manapun. Hal yang dilakukan dalam pengembangan partisipasi tidak hanya dalam bentuk tenaga, materi atau sumbangan berupa bahan-bahan material serta kerjabakti tetapi lebih dari itu setiap rakyat harus menyadari bahwa bentuk partisipasi perlu digalakan melalui sumbangan pemikiran berupa ide-ide, saran-saran, gagasan, serta keinginan dalam mengambil keputusan.

c. Berbagai Hambatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pembangunan Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan Nasional dan Daerah. Di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bermukim di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perhatian ke arah pemerataan hasil-hasil pembangunan khususnya

untuk masyarakat pedesaan menjadi sangat penting karena beberapa alasan: (1) sebagian besar masyarakat bertempat tinggal di pedesaan; (2) bagian terbesar masyarakat miskin berada di pedesaan.

Kemiskinan di pedesaan dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial yang pada akhirnya dapat memicu ketidakstabilan dan menciptakan gangguan terhadap pembangunan itu sendiri. Rendahnya produktivitas sektor pertanian dibandingkan dengan sektor-sektor non pertanian seperti sektor industri, jasa, pertambangan, dan sektor lainnya serta adanya kebijakan pembangunan yang bias perkotaan, telah menghasilkan ketimpangan pendapatan antara penduduk di perkotaan dan pedesaan. Banyak faktor yang membuat ketertinggalan perekonomian pedesaan dibandingkan dengan perkotaan. Secara singkat Evers (1998) mengungkapkan dua sebab : (1) Konteks struktural dan (2) Konteks kultural. Konteks struktural menunjuk pada kebijakan pembangunan (ekonomi & politik) yang lebih mengutamakan pembangunan perkotaan ketimbang pedesaan. Konteks kultural dikaitkan dengan stigma bahwa masyarakat pedesaan itu malas, tertinggal, bodoh, miskin dan karena itulah wajar kalau pendapatan mereka menjadi rendah. Dalam konteks struktural tersebut, Wiradi (1989) dan Hayami

Kikuchi (1990) mengungkapkan bahwa salah satu sebab rendahnya pendapatan penduduk pedesaan adalah karena keterbatasan akses modal, informasi dan teknologi serta yang paling utama adalah akses sarana dan prasarana. Keterbatasan prasarana, terutama transportasi sebagai penunjang utama kegiatan ekonomi, telah menghasilkan kesenjangan dalam standar kehidupan dan kesempatan dalam peningkatan perekonomian antara pedesaan dengan perkotaan. Ini akan berimplikasi pada rendahnya produktivitas ekonomi pedesaan.

Ketimpangan pembangunan khususnya di pedesaan, termasuk di dalamnya pembangunan prasarana dan sarana transportasi di pedesaan, tidak terlepas dari implementasi kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dengan negara sebagai aktor utama. Chamber (1990) menyebutnya sebagai kebijakan pembangunan yang bersifat *betting strong policy* dengan strategi *state centered development*. Dalam konteks ini negara menjadi inisiator, pelaksana, sekaligus pengawas dari keseluruhan pembangunan. Melalui aparat birokrasi sebagai kepanjangan tangan pemerintah, hampir semua proses pembangunan baik yang sifatnya fisik maupun non fisik ditentukan, diarahkan dan didorong oleh mereka. Model pembangunan yang top down ini tidak saja telah menciptakan ketergantungan

masyarakat kepada negara, lebih dari itu telah mematikan inisiatif dan partisipasi masyarakat. Masyarakat menjadi pasif sekaligus obyek pembangunan. Dalam konteks ini pendekatan *development for the people* lebih mengedepankan ketimbang *development of the people*. Sejak tahun 1990-an ketika PBB mencanangkan Dasawarsa Pembangunan II, arah, prinsip, model dan pendekatan pembangunan bergeser menjadi lebih berpihak pada masyarakat. Melalui pendekatan pembangunan yang mengacu pada *broad based participatory*, pembangunan yang diterapkan lebih menempatkan masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama pembangunan. Dengan model *people centered development*, pelaksanaan pembangunan didorong dengan lebih mendasarkan pada inisiatif dan partisipasi masyarakat. Pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Sewaktu masyarakat yang terlibat merasa bahwa partisipasi mereka penting, mutu, efektifitas dan efisiensi pembangunan akan lebih meningkat. Hasil kajian Brinkerhoff dan Benyamin (2002) di Filipina mengungkapkan bahwa faktor dominan yang mempengaruhi masyarakat untuk bersedia ikut berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan adalah sistem sosial berlaku. Sistem sosial mempengaruhi individu atau masyarakat melalui berbagai insentif dan disinsentif. Berbeda

dengan Brinkerhoff dan Benyamin, hasil studi Narayan (1995) menunjukkan bahwa faktor yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proyek penyediaan air di beberapa kota di Indonesia adalah faktor kemanfaatan yang diperoleh masyarakat. Mereka bersedia terlibat karena secara nyata akan memperoleh manfaat dari proyek yang akan dibangun. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Suharso (2004) dalam studi evaluasi terhadap proyek P2MPD (Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah) di 3 Kabupaten (Sleman, Bantul dan Wonogiri, ketiganya di Propinsi Jateng dan DIY) yang didanai oleh Asian Development Bank (ADB) dan Program PKPS BBM (Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM) Infrastruktur Pedesaan yang didanai oleh APBN. Kedua program tersebut berfokus pada pembangunan infrastruktur pedesaan seperti jalan, jembatan, irigasi, dan drainase. Hasil studi evaluasi kedua proyek tersebut menemukan bahwa kesediaan masyarakat untuk terlibat /berpartisipasi dalam bentuk memberikan sumbangan natura dan innatura didorong oleh faktor harapan terhadap manfaat yang akan diperoleh, sistem sosial, status sosial ekonomi masyarakat dan budaya gotong royong. Berbeda dengan pandangan kedua kajian di atas, Putnam (1993) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

kesediaan seseorang atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan, termasuk dalam membangun infrastruktur pedesaan adalah berkaitan dengan situasi saling ketergantungan, kepercayaan, dan jaringan organisasi sosial yang memfasilitasi kerjasama untuk manfaat bersama.

Berbagai kajian yang membahas tentang faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan termasuk pembangunan infrastruktur, sebagian besar membahas hal-hal yang mempengaruhi persepsi, motivasi dan kemampuan dalam berkontribusi, baik secara individu maupun kolektif. Namun demikian kajian dari dimensi kewilayahan tidak banyak yang membahas. Kajian umumnya meletakkan secara parsial pada sisi ekonomi, budaya dan kelembagaan yang melekat pada masyarakat sebagai entitas wilayah dan individu sebagai bagian dari masyarakat. Partisipasi digali pada tingkat individu dan masyarakat sebagai subyek, tidak meletakkan pada level yang lebih makro yaitu wilayah sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan. Pemikiran secara parsial yang mengedepankan sektor-sektor tertentu atau lebih kepada satu sudut pandang dari latar belakang expertise penelitiannya tidak akan menjawab persoalan secara makro yang sesungguhnya lebih rumit dimana satu dan lainnya saling



berhubungan. Partisipasi yang ditujukan dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melekat pada masyarakat itu sendiri, seperti perekonomian, kebudayaan dan kehidupan sosialnya. Lebih jelasnya, penting untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa dilihat dari aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek geografi desa. Dengan diketahuinya hubungan antara partisipasi masyarakat dengan aspek tersebut dapat dijadikan acuan bagi para perencana wilayah dalam implementasi kebijakan pembangunan desa. Hasil penelitian membuktikan pula bahwa minimnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa antara lain disebabkan karena berbagai faktor diantaranya :

### 1. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan yang rendah pada masyarakat Desa Kuanom juga turut menentukan minimnya tingkat partisipasi masyarakat hal ini dapat dilihat dari hasil kajian sebelumnya bahwa tingkat partisipasi masyarakat sebagian besar berbentuk partisipasi tenaga. Dapatlah difahami bahwa model partisipasi seperti itu dipengaruhi oleh latar belakang rendahnya tingkat pendidikan masyarakat khususnya di Desa Kuanom sebagian besar latar

belakang pendidikan masyarakat adalah berlatar belakang pendidikan SLTP dan SD. Dengan demikian dapatlah difahami bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin mempengaruhi besarnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Begitu pula sebaliknya bahwa rendahnya tingkat pendidikan masyarakat akan sangat berbarengan dengan rendah atau minimnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

### 2. Faktor Sikap mental

Sikap mental menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan pembangunan desa. Seperti yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1998) bahwa kelemahan Bangsa kita dalam membangun disebabkan karena lemahnya sikap mental. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan terutama bagi masyarakat desa Kuanom dimana sebagian masyarakat desa masih memiliki sikap mental yang lemah dalam membangun. Sikap mental seperti Malas, Kurang percaya diri, apatis, masa bodoh, menerima apa adanya menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Rendahnya sikap mental akan mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

### 3. Tingkat pendapatan

Faktor pendapatan masyarakat sangat berkaitan dengan keberadaan masyarakat dalam berusaha. Dari segi ekonomi masyarakat desa Kuanom sebetulnya memiliki sumberdaya alam yang sangat melimpah namun kekayaan alam tersebut belum dapat dikelola secara intensif disebabkan karena keterbatasan akan pengetahuan, penguasaan teknologi serta kurangnya modal, sehingga masyarakat secara umum masih memiliki tingkat produksi yang rendah. Rendahnya tingkat produksi juga akan mempengaruhi rendahnya pendapatan, dan rendahnya pendapatan akan mempengaruhi minimnya tingkat partisipasi khususnya dalam memberikan kesediaan untuk membantu pemerintah desa. Jadi pendapatan juga menjadi salah satu hambatan bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa.

### KESIMPULAN

1. Pembangunan desa merupakan bagian integral, dari pembangunan nasional, karena memiliki peranan penting dan strategis. Berhasilnya pelaksanaan pembangunan desa akan mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa. Partisipasi

masyarakat dalam pembangunan Desa akan sangat berkaitan dengan bentuk partisipasi yang mereka berikan antara lain partisipasi dalam bentuk harta benda, ide-ide/gagasan, partisipasi tenaga, partisipasi dalam bentuk materi. Masyarakat desa memiliki tingkat partisipasi yang berbeda sesuai dengan bentuk partisipasi yang mereka berikan. Hasil penelitian membuktikan bahwa bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan dalam pelaksanaan pembangunan Desa yang lebih dominan adalah bentuk partisipasi tenaga serta pemberian materi.

2. Pembangunan Desa memiliki arti penting dan strategis jika diukur dari realisasi pembangunan Fisik dan non Fisik. Hasil penelitian membuktikan bahwa realisasi pelaksanaan pembangunan fisik dapat diarahkan kegiatan dalam infra struktur seperti pembuatan jalan setapak, pembuatan gorong-gorong/Saluran air, Pos Kamling, Pembangunan Balai Desa, Air bersih/MCK dan Reling Tangga dengan biaya secara keseluruhan Rp. 104.500.000 yakni dari dana Bantuan Pembangunan Desa (Dana APBD) sebesar Rp. 87.000.000 sedangkan dana dari swadaya masyarakat adalah sebesar Rp. 17.500.000.- Dari segi jumlah dana yang diserap dalam pelaksanaan pembangunan fisik memang tidak terlalu besar namun cukup membantu

masyarakat desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan lainnya, terutama untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam merealisasikan pelaksanaan pembangunan hal ini dilihat dari besarnya animo masyarakat untuk dapat membantu pemerintah desa. Untuk pelaksanaan pembangunan non fisik yakni diarahkan pada upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar dapat mandiri dalam melaksanakan kegiatan usaha mereka.

3. Pembangunan Desa mempunyai peran yang sangat penting

dalam pelaksanaan pembangunan Nasional dan Daerah. Di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bermukim di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian membuktikan pula bahwa minimnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa antara lain disebabkan karena berbagai faktor diantaranya : Faktor Pendidikan, Sikap mental dan faktor pendapatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi Surya Subrata, 2001, Pokok-pokok dalam pembangunan Masyarakat Desa PT Sediatama Jakarta.
- A.Gany, 2001, Pembangunan Pedesaan, P3PK UGM, Yogyakarta.
- Arthur Dunham 1987, Community Development, Oxford Univ. Press.
- Batten. T.R., 1978, Communities and Their Development, Oxford Univ. Press
- Bryant dan Whyte 1982, Manajemen Pembangunan Sinar Pratama Jakarta. York.
- Donald Cons, 2004, Administrasi Pembangunan Penerbit PT Gramedia Jakarta
- Fitriasturi, 2005, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Tengah, (Studi Optimalisasi Fungsi DPRD), Tesis, Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro, Semarang.

- Mubyarto, 1984, Pembangunan Desa Pertanian, Penerbit Rineka Cipta Jakarta
- 2004, Pengantar Ekonomi Pertanian, Penerbit BPFE Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1987, . Partisipasi Masyarakat Desa di Beberapa Desa. Yayasan Karya Dharma, Jakarta.
- , 2002, Pembangunan Masyarakat mempersiapkan masyarakat Tinggal Landas , Penerbit PT Gramedia Jakarta.
- , 1997, Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan, Penerbit Pradnya Paramita.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 1998, Manajemen Pelayanan Publik, CV Rajawali Jakarta.
- Oemar Said 1982, Pokok-pokok Pembangunan Desa, CV Rajawali Jakarta.
- Soemarno, 2005, Prilaku Masyarakat Petani, Penerbit PT Armico Bandung
- Suparman dan Soejiono 1980, Pembangunan Masyarakat Desa CV Bina Cipta Jakarta.
- Setyono, 2002 Pembangunan Desa Pertanian, CV Yayasan Dian Desa.
- Soemadi Rekso Putranto 1992, Partisipasi Masyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan Berencana, CV Rajawali Jakarta.
- Silalahi, T.B. 1999, Administrasi Perencanaan, CV Sinar Media Jakarta.
- Wijaya H. A. 2001, Pemerintahan Desa, Yayasan Karya Dharma Jakarta.
- Wiradi, 1989, Sistem dan Mekanisme perencanaan berbasis partisipatif, Beta Mulia sertajaya,



